



**PERJANJIAN KINERJA (REVISI) TAHUN 2017 BPSDM PERHUBUNGAN**

**PERJANJIAN KINERJA (REVISI)  
TAHUN 2017  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN**

JL. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat

## **KATA PENGANTAR**

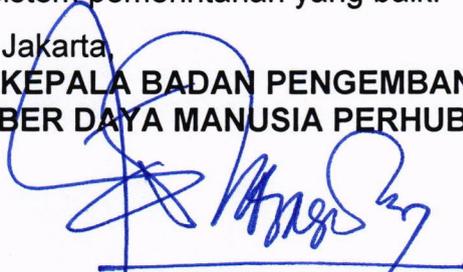
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan perencanaan kinerja tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen anggaran/DIPA. Selama Tahun Anggaran 2017 terdapat Perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perubahan Pagu Anggaran, pergantian atau mutasi pejabat di lingkungan BPSDM Perhubungan dan reviu RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015-2019 serta reviu RENSTRA BPSDM Perhubungan 2015-2019, sehingga diperlukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini sekaligus merupakan kontrak kerja lanjutan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada akhir Tahun Anggaran 2017.

Semoga Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan SDM agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Jakarta, 2017  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



---

**DJOKO SASONO**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630925 199003 1 003

## BAB I P E N D A H U L U A N

### A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi agar dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksananya.

Penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi.

Dalam rangka ikut menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang unggul dan berstandar internasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui pembinaan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.

BPSDM Perhubungan berkomitmen untuk ikut serta mewujudkan "*Road Map to Zero Accident*" dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas perhubungan melalui terwujudnya SDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan

transportasi yang handal. Caranya yaitu dengan mendidik insan perhubungan di berbagai sekolah-sekolah perhubungan (UPT) di bawah naungan BPSDM Perhubungan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 780 Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 781 adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

### **C. Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

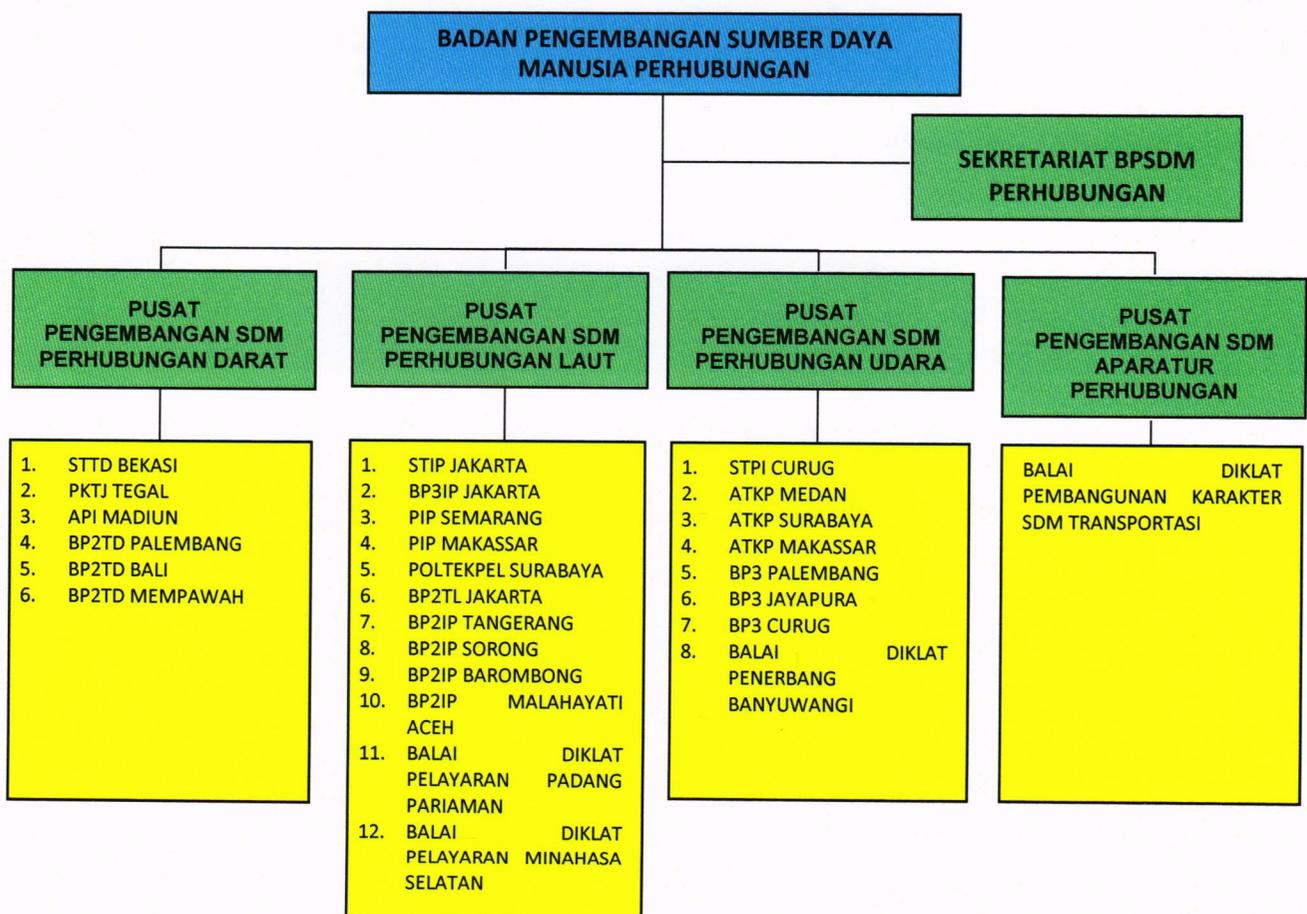
Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki 27 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain :

1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta;
3. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug;
4. Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;
5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali;
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang;
8. Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
11. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya;
12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta;
13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang;
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong;
15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong;
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh;
17. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;
18. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya;

19. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar;
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang;
21. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura;
22. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;
23. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;
24. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman;
25. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan;
26. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bandung;
27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019**

#### **A. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015–2019**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa untuk tahun 2015-2019 tidak ada visi dan misi unit eselon I, melainkan mengikuti Visi dan Misi Presiden terpilih, Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), kemudian diturunkan menjadi Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Tingkat Eselon I.

##### **1. Visi Dan Misi Presiden**

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

## **2. Visi Dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

Penyusunan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, juga menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi dan Undang-Undang pendukung yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

Dalam keempat Undang-Undang di Bidang Transportasi tersebut diatas, mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah:

**“Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka telah dirumuskan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

### **3. Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)**

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

#### **4. Tujuan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan SDM Transportasi yang prima profesional, beretika dan berdaya saing internasional dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, memberikan nilai tambah
2. Peningkatan kinerja organisasi serta kehandalan sistem informasi manajemen SDM transportasi
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan keselamatan transportasi

#### **5. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

Berdasarkan pemetaan strategi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dapat diperoleh sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peserta diklat di bidang transportasi yang berpotensi tinggi yang didukung fisik dan jasmani yang prima
2. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat
3. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi
4. Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK
5. Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional
6. Terwujudnya Pengabdian Masyarakat yang Mempunyai Manfaat bagi Masyarakat di Sekitar Lembaga Diklat terhadap Total kegiatan Masyarakat yang Dilaksanakan
7. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, *international recognition* serta *Public Private Partnership*

8. Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP
9. Terwujudnya peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi yang memenuhi ketentuan nasional dan/atau internasional
10. Terwujudnya sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir yang memenuhi standar diklat Transportasi
11. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang kompeten.

**6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**

Dari Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penajaman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tabel. 2.1.

Ditetapkan bahwa IKU BPSDM Perhubungan yang telah tertuang dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian perhubungan sebagaimana berikut :

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

Adapun Sasaran Strategis dan IKU lainnya merupakan indikator kinerja internal BPSDM Perhubungan untuk mengetahui cause-and-effect relationship antar SS dan IKU dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi manajemen kinerja di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan

SASARAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN
a.	Terwujudnya Peserta Diklat SDM Transportasi Berpotensi Tinggi yang Didukung Fisik dan Rohani yang Prima.	1.	Jumlah Peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Penyelenggaraan Diklat BPSDM Perhubungan.	Orang
b.	Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi yang Bersertifikat.	2.	Jumlah Lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Kompeten yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap Tahun Sesuai Standar Kompetensi.	Orang
c.	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi.	3.	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi.	(%)
d.	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi yang Berbasis Kompetensi dan sesuai dengan Perkembangan IPTEK.	4.	Jumlah Kurikulum, Silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Berbasis Kompetensi.	Dokumen
		5.	Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur	Dokumen

SASARAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN
			Perhubungan yang Berbasis Kompetensi.	
e.	Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional.	6.	Jumlah Penelitian oleh Tenaga Pengajar yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional.	Dokumen
f.	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Diklat.	7.	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	Kegiatan
g.	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i> .	8.	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Nasional atau Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i> .	Dokumen
h.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.	9.	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai
		10.	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)
		11.	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP.	Level
i.	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	12.	Jumlah Draft Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya yang Dihasilkan.	Dokumen

SASARAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN
j.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Diklat Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi.	13.	Jumlah Sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir.	Unit
		14.	Jumlah Prasarana Baru Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Dibangun.	M2
k.	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang kompeten.	15.	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi Bersertifikat yang Memiliki Kompetensi di Bidangnya.	Orang
		16.	Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi yang Memiliki Kompetensi di Bidangnya.	Orang

## 7. Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. Pemerataan kesempatan, keikutsertaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang transportasi;
2. Mendorong peran swasta untuk ikut meningkatkan kontribusi dalam pengembangan SDM transportasi;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan melalui penyempurnaan kelembagaan dan pembentukan PK BLU

4. Penyediaan pendidik bersertifikat dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
5. Pengembangan kurikulum silabi sesuai dengan pengembangan IPTEK
6. Pemanfaatan sistem informasi manajemen SDM transportasi dalam mendukung pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
7. Pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan swasta dan inovasi pembiayaan lainnya

#### **8. Strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan**

Dalam rangka visi dan misi, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disusun strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun Man Power Planning SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

2. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan;

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis

3. Mengembangkan Kualitas dan kapasitas diklat SDM Transportasi;

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan,

modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, strategi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

- a) Perbaiki Kurikulum pada sekolah-sekolah dibawah BPSDMP dengan prosentase pendidikan : 70% praktek dan 30% teori.
- b) Perbaiki kualitas dosen (pemagangan dan beasiswa S3/S3);
- c) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan system pendidikan e-learning, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;
- d) Peningkatan kerjasama pendidikan antara BPSDMP dengan Universitas dan lembaga lain;
- e) Menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

#### 4. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi;

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

#### 5. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk

beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

6. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala Nasional maupun Internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

7. Pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM transportasi.

Dalam Penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder , misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu mengingat tidak semua aktivitas pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, skill SDM dan finansial.

**BAB III**  
**PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2017**

**A. Indikator Kinerja**

Dalam rangka mengukur kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SK.160/BPSDMP-2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2017 yaitu :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		3
a.	Terwujudnya peserta Diklat SDM Transportasi yang berpotensi tinggi yang didukung fisik dan rohani yang prima.	1.	Jumlah peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar penyelenggaraan diklat BPSDM Perhubungan.	Orang
b.	Terwujudnya lulusan Diklat SDM Transportasi yang bersertifikat.	2.	Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi.	Orang
c.	Terlaksananya pengembangan Sumber	3.	Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi.	(%)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		3
	Daya Manusia Transportasi.			
d.	Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK.	4.	Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
e.	Peningkatan jumlah penelitian bidang transportasi yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.	5.	Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
f.	Terlaksananya pengabdian masyarakat oleh lembaga diklat.	6.	Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.	Dokumen
		7.	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	Kegiatan
g.	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga,	8.	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		3
	<i>international recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i> .		profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i> .	
h.	Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.	9.	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai
		10.	Tingkat penyerapan anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)
		11.	Nilai pencapaian tingkat maturitas SPIP.	Level
i.	Terwujudnya peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Transportasi yang memenuhi ketentuan nasional dan/atau internasional.	12.	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan.	Dokumen
j.	Tersedianya sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir yang memenuhi standar diklat SDM Transportasi.	13.	Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	Unit
		14.	Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun.	M2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		3
k.	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang kompeten.	15.	Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya.	Orang
		16.	Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.	Orang

### B. Target Kinerja

Sesuai dengan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2017, maka target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1		2		3	4	5
a.	Terwujudnya peserta Diklat SDM Transportasi yang berpotensi tinggi yang didukung fisik dan rohani yang prima.	1.	Jumlah peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar penyelenggaraan diklat BPSDM Perhubungan.	514.122	414.400	Orang
b.	Terwujudnya lulusan Diklat SDM Transportasi yang bersertifikat.	2.	Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan	500.000	391.974	Orang

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5		
			Aparatur Perhubungan yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi.			
c.	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi.	3.	Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi.	-	80,00	(%)
d.	Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK.	4.	Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	9	5	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1		2		3	4	5
		5.	Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	199	184	Dokumen
e.	Peningkatan jumlah penelitian bidang transportasi yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.	6.	Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.	-	51	Dokumen
f.	Terlaksananya pengabdian masyarakat oleh lembaga diklat.	7.	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	-	40	Kegiatan
g.	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan	8.	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga	218	192	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5		
	kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i> .		pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i> .			
h.	Meningkatnya optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.	9.	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	87	82,60	Nilai
		10.	Tingkat penyerapan anggaran BPSDM Perhubungan.	95,15	92,84	(%)
		11.	Nilai pencapaian tingkat maturitas SPIP.	-	2	Level
i.	Terwujudnya peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Transportasi yang memenuhi ketentuan nasional dan/atau internasional.	12.	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan.	11	9	Dokumen
j.	Tersedianya sarana dan prasarana diklat berbasis	13.	Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi	806	936	Unit

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5		
	teknologi tinggi/mutakhir yang memenuhi standar diklat SDM Transportasi.		Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.			
		14.	Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun.	127.940	123.071	m <sup>2</sup>
k.	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang kompeten.	15.	Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya.	-	1.459	orang
		16.	Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.	2.921	1.680	orang

Adapun rincian target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2017 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
1.	<b>Jumlah Peserta Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan.</b>	<b>414.400</b>	<b>Orang</b>
a.	Jumlah Peserta Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	9.567	
	1) Peserta diklat Pembentukan	2.496	
	2) Peserta Pelatihan Teknis	5.181	
	3) Peserta Pendidikan Penjurangan	50	
	4) Peserta Diklat SDM Transportasi Darat	120	
	5) Peserta Pelatihan Lainnya	922	
	6) Peserta Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	798	
b.	Jumlah Peserta Diklat SDM Transportasi Laut, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	384.591	
	1) Peserta diklat Pembentukan	12.048	
	2) Peserta diklat Penjurangan/Peningkatan	9.658	
	3) Peserta Pelatihan Pemutakhiran	19.404	
	4) Peserta Pelatihan Penyegaran	60.710	
	5) Peserta Pelatihan Pengukuhan	6.060	
	6) Peserta Pelatihan Teknis	262.079	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	7) Peserta Pelatihan Lainnya	13.890	
	8) Peserta Pelatihan Penyetaraan	300	
	9) Peserta Training/Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan	168	
	10) Peserta Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	274	
c.	Jumlah Peserta Diklat SDM Transportasi Udara, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	12.390	
	1) Peserta diklat Pembentukan	3.358	
	2) Peserta diklat Penjurangan/Peningkatan	20	
	3) Peserta Pelatihan Teknis	8.242	
	4) Peserta Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	770	
d.	Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	7.852	
	1) Peserta Diklat Struktural	96	
	2) Peserta Pendidikan Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM (Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana)	66	
	3) Peserta Training/Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan	739	
	4) Peserta Pelatihan Teknis	1.648	
	5) Peserta Diklat Character Building	5.200	
	5) Peserta Diklat Prajabatan	103	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
2	<b>Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi</b>	<b>391.974</b>	<b>Orang</b>
	a. Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian, yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi	7.304	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	599	
	2) Lulusan Pelatihan Teknis	5.002	
	3) Peserta Pendidikan Penjurusan	20	
	4) Peserta Diklat SDM Transportasi Darat	120	
	5) Peserta Pelatihan Lainnya	790	
	6) Lulusan Pendidikan Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM (Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana)	773	
	b. Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Laut, yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi	367.350	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	3.351	
	2) Lulusan diklat Penjurusan/Peningkatan	7.004	
	3) Lulusan Pelatihan Pemutakhiran	24.444	
	4) Lulusan Pelatihan Penyegaran	66.710	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	5) Lulusan Pelatihan Pengukuhan	6.060	
	6) Lulusan Pelatihan Teknis	245.246	
	7) Lulusan Pelatihan Lainnya	13.890	
	8) Lulusan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	645	
c.	Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Udara, yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi	9.487	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	612	
	2) Lulusan diklat Penjurangan/Peningkatan	40	
	3) Lulusan Pelatihan Teknis	8.143	
	4) Lulusan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	692	
d.	Jumlah lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan, yang kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun sesuai standar kompetensi	7.833	
	1) Lulusan Diklat Struktural	96	
	2) Lulusan Pendidikan Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM (Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana)	47	
	3) Lulusan Training/Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan	739	
	4) Lulusan Pelatihan Teknis	1.648	
	5) Lulusan Diklat Character Building	5.200	
	6) Lulusan Diklat Prajabatan	103	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
<b>3</b>	<b>Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi</b>	<b>80,00</b>	<b>(%)</b>
	a. Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian.	80,00	
	b. Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi Laut.	80,00	
	c. Prosentase penyerapan lulusan Diklat SDM Transportasi Udara	80,00	
<b>4</b>	<b>Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>
	a. Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang berbasis kompetensi	-	
	b. Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Laut yang berbasis kompetensi	3	
	c. Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Udara yang berbasis kompetensi	-	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah kurikulum, silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi	2	
<b>5</b>	<b>Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi</b>	<b>184</b>	<b>Dokumen</b>
	a. Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang berbasis kompetensi	2	
	b. Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Laut yang berbasis kompetensi	156	
	c. Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Transportasi Udara yang berbasis kompetensi	26	
	d. Jumlah modul/bahan ajar diklat SDM Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi	0	
<b>6</b>	<b>Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional</b>	<b>51</b>	<b>Dokumen</b>
	a. Jumlah penelitian SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional	6	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	b. Jumlah penelitian SDM Transportasi Laut oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional	24	
	c. Jumlah penelitian SDM Transportasi Udara oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional	21	
	d. Jumlah penelitian SDM Aparatur Perhubungan oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional	0	
<b>7</b>	<b>Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan</b>	<b>40</b>	<b>Kegiatan</b>
	a. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang berbasis kompetensi.	10	
	b. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi.	16	
	c. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi.	14	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	0	
8	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i>	192	Dokumen
	a. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Darat dan Perkeretaapian dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i>	9	
	b. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Laut lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i>	116	
	c. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Udara dengan lembaga	54	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
	VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)
pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i>		
d. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Aparatur Perhubungan dengan lembaga pemerintah/swasta, nasional atau internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, <i>international recognition</i> serta <i>public private partnership</i>	13	
<b>9 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan</b>	<b>82,60</b>	<b>Nilai</b>
<b>10 Target Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan</b>	<b>92,84</b>	<b>(%)</b>
<b>11 Nilai pencapaian tingkat maturitas SPIP</b>	<b>2</b>	<b>Level</b>
<b>12 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang dihasilkan</b>	<b>9</b>	<b>Dokumen</b>
a. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang dihasilkan	-	
b. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Transportasi Laut yang dihasilkan	-	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	c. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Transportasi Udara yang dihasilkan	-	
	d. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Aparatur Perhubungan yang dihasilkan	9	
<b>13</b>	<b>Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir</b>	<b>936</b>	<b>Unit</b>
	a. Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	76	
	b. Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Laut yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	544	
	c. Jumlah sarana Diklat SDM Transportasi Udara yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	316	
	d. Jumlah sarana Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	0	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
<b>14</b>	<b>Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun</b>	<b>123.071</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	a. Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang dibangun	17.621	
	b. Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Laut yang dibangun	17.425	
	c. Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Udara yang dibangun	88.025	
	d. Jumlah prasarana baru Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang dibangun	0	
<b>15</b>	<b>Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya</b>	<b>1.459</b>	<b>Orang</b>
	a. Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya	148	
	b. Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi Laut bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya	961	
	c. Jumlah pendidik Diklat SDM Transportasi Udara bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya	320	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah pendidik Diklat SDM Aparatur Perhubungan bersertifikat yang memiliki kompetensi di bidangnya	30	
<b>16</b>	<b>Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi yang memiliki kompetensi di bidangnya</b>	<b>1.680</b>	<b>Orang</b>
	a. Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang memiliki kompetensi di bidangnya	359	
	b. Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi Laut yang memiliki kompetensi di bidangnya	777	
	c. Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Transportasi Udara yang memiliki kompetensi di bidangnya	472	
	d. Jumlah tenaga kependidikan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi di bidangnya	72	

Total pagu akhir Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada DIPA Tahun Anggaran 2017 (posisi 31 Desember 2017) adalah **Rp. 4.238.535.387.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

• Rincian Persumber dana:

- RM	:	Rp.	2.952.656.310.000,-
- PNB	:	Rp.	28.944.694.000,-
- BLU	:	Rp.	1.256.934.383.000,-

- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai	:	Rp.	354.501.951.000,-
- Belanja Barang	:	Rp.	1.027.260.586.000,-
- Belanja Modal	:	Rp.	1.570.893.773.000,-

### C. Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2017, sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Perhubungan Darat :

##### A. Pengadaan Peralatan:

##### 1. Pengadaan Peralatan di STTD Bekasi berupa:

- Alat Peraga Perencanaan Transportasi
- Upgrade Hawkeye 1000
- Reflectometer Rambu
- Reflectometer Marka
- Pengukur Ketebalan Marka
- Pengadaan Software Laboratorium Komputer
- Software Aplikasi Transportasi
- Upgrade Lab Outdoor Perkeretaapian
- Upgrade Lab PKB
- Sarana Praktek PKB Teknologi Injeksi Roda 2
- Pengadaan Peralatan Perbengkelan Otomotif
- Pengadaan AC Standing
- Pengadaan Meubelair Ruang Makan Taruna
- Pengadaan Server dan Pengembangan Jaringan
- Pengadaan Perlengkapan Asrama BPPTD Mempawah
- Pengadaan Perlengkapan Ruang Makan BPPTD Mempawah

##### 2. Pengadaan sarana di BP2TD Palembang berupa:

- Pengadaan River Dredging Simulator
- STC
- GPS Geodetic

- Echosonder
  - Peralatan Survey Topografi
  - Pengadaan Maket Miniatur Pelabuhan
  - Pengadaan Maket Miniatur Terminal Jalan
  - Pengadaan Self Contained Breathing Apparatus
  - Pengandaan Lab Hidrolika
3. Pengadaan sarana di API Madiun berupa:
- Peralatan Railway Electricity Trainer
  - Peralatan Pengujian Tanah
  - Peralatan Pengujian Material Beton
  - Peralatan Las dan Uji Aluminothermic
  - Peralatan Railway Train Detection
  - Peralatan Trainer Heavy Diesel Engine
  - Peralatan Railway Mechanical Trainer
  - Perlengkapan Laboratorium Bahasa

## **B. Pembangunan prasarana**

1. Pembangunan prasarana di STTD Bekasi berupa:
- Pembangunan/Peningkatan Ruang Makan Taruna seluas 2.688 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Gedung Workshop seluas 800 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Pagar seluas 536 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Lanjutan Gedung Dapur dan Ruang Makan BPPTD Mempawah seluas 986 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Lanjutan Gudang dan Ruang Briefing BPPTD Mempawah seluas 480 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Tipe 70 BPPTD Mempawah seluas 203 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Area Latihan Pemadam Kebakaran BPPTD Mempawah seluas 240 m<sup>2</sup>
2. Pembangunan prasarana di PKTJ Tegal berupa:

- Modernisasi Kelas Kampus Semeru (14 Kelas)
- Pengadaan Laboratorium PKB
- 3. Pembangunan prasarana di BP2TD Bali berupa:
  - Pembangunan Jaringan Drainase
  - Pembangunan Jaringan Listrik Tahap III
  - Pembangunan Jaringan Air Bersih Tahap III
  - Jaringan Jalan Lingkungan
- 4. Pembangunan prasarana di BP2TD Palembang berupa:
  - Pembangunan Asrama Taruna (Barak)
  - Pembangunan Rumah Dinas/Rumah Dosen
  - Relokasi Bangunan Genset
  - Pembangunan Gedung Binatu
  - Pembangunan Kelas taruna
  - Pembangunan Ground Reservoir

## **2. Pendidikan Perhubungan Laut :**

### **A. Pengadaan Peralatan:**

1. Pengadaan Peralatan di STIP berupa:
  - Pengadaan Kapal Latih 2 (dua) Unit
  - Pengadaan CCTV & Access Control
  - Pengadaan Paging System
  - Pengadaan Sewage Treatment Plant
  - Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) Asrama berikut instalasinya
2. Pengadaan Peralatan di PIP Semarang berupa:
  - Pembangunan Pengadaan Maket Pelabuhan
  - Travo 1250 Kva
  - Genset 810 Kva beserta Instalasi
  - Pengadaan CBA (Computer Based Assesment)
  - Pengadaan Navigasi Simulator
3. Pengadaan Peralatan di PIP Makassar berupa:

- Pengadaan Model Laboratorium
  - Pengadaan LCC (Large Crude Oil Carrier) Class
  - Pengadaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) Class
  - Pengadaan Navigation Equipment
  - Pengadaan Electrical dan Electronic Lab.
  - Pengadaan Peralatan Lecture Theater Kampus II
  - Pengadaan Interior Main Building
  - Pengadaan Travo dan Jaringan Listrik
  - Pengadaan LCD
  - Pengadaan Maket
  - Pembangunan Kapal Latih 1200 GT Special Purpose
4. Pengadaan High Voltage di BP2IP Malahayati Aceh
  5. Pengadaan Sarana Diklat di BP3IP berupa:
    - Radar Simulator
    - Upgrading Console Simulator
    - Computer Base Training
  6. Pengadaan 2 Unit kapal latih multi purpose di POLTEKPEL Surabaya
  7. Pengadaan Peralatan di BP2IP Barombong berupa:
    - Pengadaan Fire Hydrant
    - Pengadaan Dewi – dewi (davit sekoci)
  8. Pengadaan Peralatan di BP2IP Sorong berupa:
    - Pengadaan High Voltage Simulator
    - Pengadaan Computer Based Training
  9. Pengadaan Peralatan di BP3 Minahasa Selatan berupa:
    - Pengadaan Simulator dan Laboratorium
    - Pengadaan Real Engine + Workshop
    - Pengadaan GMDSS Simulator + Real GMDSS Trainee
    - Pengadaan Radar Arpa Simulator
    - Pengadaan ECDIS Simulator + Real ECDIS Trainee
    - Pengadaan CBT (Computer Base Training )

- Pengadaan Anatomycal Navigated Lamp System
  - Pengadaan Laboratorium Komputer
  - Pengadaan Steering Gear Simulator
10. Pengadaan Peralatan di BP3 Padang Pariaman berupa:
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan
  - Pengadaan Peralatan Engine Hall
  - Pengadaan Simulator Diklat Perhubungan Laut
  - Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan
  - Pengadaan Perlengkapan Medis Dokter Gigi
  - Furnitur dan Interior Gedung Pendidikan
  - Peralatan Poliklinik
  - Peralatan Kesamaptaan Taruna
  - Inventaris Kantor
  - Kendaraan Operasional kantor
  - Kendaraan Operasional Ambulan
  - Kendaraan Operasional Bak Terbuka

## **B. Pembangunan prasarana**

1. Pembangunan prasarana di PIP Semarang berupa:
  - Pembangunan Rumah Genset
  - Pengembangan Poliklinik
2. Pembangunan prasarana di BP2IP Malahayati Aceh berupa:
  - Pembangunan Gedung Asrama Taruni lantai 2 (dua) dan 3 (tiga);
  - Pembangunan Gedung Kelas Lanjutan II;
3. Pembangunan prasarana di BP2TL berupa:
  - Renovasi Gedung Asrama seluas 3.600 m<sup>2</sup>
  - Renovasi Gedung ISTS seluas 1.044 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Workshop DP IV dan V seluas 424 m<sup>2</sup>
4. Pembangunan gedung pembinaan mental dan moral (Masjid) seluas 270 m<sup>2</sup> di BP2IP Tangerang

5. Peningkatan kapasitas ruang kelas seluas 2000 m<sup>2</sup>, Renovasi gapura pintu masuk seluas 517 m<sup>2</sup>, Jasa konsultan perencana pembangunan Dermaga Latih, dan Jasa konsultan perencana pembangunan Multi Function Building di BP2IP Sorong
6. Penyusunan DED, SID, dan AMDAL di BP3 Minahasa Selatan berupa:
  - Perencanaan Gedung Auditorium BDP Minsel
  - Perencanaan Gedung Kelas BDP Minsel
  - Perencanaan Gedung Dormitory dan Sarana Ibadah BDP Minsel
  - Perencanaan Konstruksi Dermaga
  - Studi AMDAL Pembangunan Dermaga
7. Penataan Landscape kawasan, Review DED Pembangunan Balai, Konsultan Perencanaan Penataan Lanscape Kawasan, dan Konsultan Pengawasan Penataan Lanscape Kawasan di BP3 Padang Pariaman

### **3. Pendidikan Perhubungan Udara :**

#### **A. Pengadaan Peralatan:**

1. Pengadaan Peralatan di STPI berupa:
  - Pengadaan 45 Unit Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine (Multiyears)
  - Pengadaan 5 Unit Pesawat Latih Sayap Tetap Multi Engine (Multiyears)
  - Pengadaan 1 Unit Pesawat Latih Sayap Putar Multi Engine (Multiyears)
2. Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Petir Terintegrasi di ATKP Medan
3. Pengadaan Peralatan di POLTEKBANG Surabaya berupa:
  - Pengadaan Peralatan Panel Cubicle
  - Pengadaan Genset 500 kVa dan Panel Sinkron
4. Pengadaan Peralatan di ATKP Makassar berupa:

- Pengadaan Peralatan Lab. Simulator Aerodrome
  - Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa (ICAO ELP)
  - Pengadaan Genset 500 kVA
  - Pengadaan Peralatan Meubeler Gedung Mini Theater Asrama dan Kelas
  - Pengadaan Kendaraan Ambulance
  - Pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik, Air, Telepon
5. Pengadaan Sarana di BP3 Jayapura berupa:
- Pengadaan Mobil Praktek PKP-PK
  - Pengadaan alat praktek Navigasi (DVOR)
6. Pengadaan Sarana di BP3 Banyuwangi berupa:
- Pekerjaan Perawatan Hardware Simulator FMX 1000
  - Pekerjaan Perawatan Software Simulator FMX 1000
  - Pengadaan Crew Tranporter
  - Sarana Penunjang
  - Fasilitas Outbound
7. Pengadaan Sarana di BP3 Curug berupa:
- Pembangunan Learning Management System;
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang.

## **B. Pembangunan prasarana**

1. Pembuatan Shelter dan Taxiway Termasuk Bangunan Operasi dan Hanggar seluas 2.460 m<sup>2</sup> di STPI
2. Rencana Induk dan Masterplan di ATKP Medan
3. Pembangunan prasarana di POLTEKBANG Surabaya berupa:
  - Pembangunan Run Up Area seluas 1.728 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Power House seluas 300 m<sup>2</sup>
4. Pembangunan prasarana di POLTEKBANG Surabaya berupa:
  - Konstruksi Baja Atap Penutup pada selasar ruang makan dan jendela area ruang makan seluas 1792 m<sup>2</sup>
  - Pembuatan Taman Landscape seluas 790 m<sup>2</sup>

- Pekerjaan Pintu Baja dan Dinding ACP gedung hanggar seluas 706 m<sup>2</sup>
  - bangunan Tempat Limbah Cair, IPAL Lingkungan
  - Pembangunan Selasar Kampus Baru ATKP Makassar seluas 1017 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Kolam/Penampungan Air (PON) seluas 3072 m<sup>2</sup>
  - Review AMDAL
5. Renovasi Asrama Alpha di BP3 Palembang
6. Pembangunan prasarana di BP3 Jayapura berupa:
- Pengadaan Lahan seluas 57.000 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Barak Taruna (Barak A) seluas 3473 m<sup>2</sup>
  - Pengembangan Flat Instruktur menjadi 4 Lantai seluas 826 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Fasilitas Ibadah dan Gedung Pelayanan Umum seluas 598 m<sup>2</sup>
  - Pembangunan Kelas Bravo seluas 2416 m<sup>2</sup>
7. Pembangunan prasarana di BP3 Banyuwangi berupa:
- Pembangunan Apron dan Taxi Way
  - Pembangunan Hanggar Pesawat
  - Pos security
8. Pembangunan prasarana di BP3 Curug berupa:
- Pembangunan Gedung Laboratory;
  - Pembangunan Fasilitas Diklat Logistic Cargo;
  - Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Manajemen Penerbangan;
  - Pembangunan Fasilitas Navigasi dan Telekomunikasi Penerbangan;
  - Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Diklat Airport Handling;
  - Pembangunan Pusat Administrasi Akademik;
  - Perencanaan Pembangunan Gedung Flat

**4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BPSDMP :**

1. Pendidikan Gelar Pascasarjana S2 dan S3;
2. Peningkatan Kualitas Dosen BPSDMP dan Aparatur Kementerian Perhubungan;
3. Assessment Dosen dan Feedback di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
4. Sistem Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR)

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Penetapan Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini disusun berdasarkan 11 Sasaran Strategis dengan 16 Indikator Kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.234.505.069.000,-

Dengan sasaran strategis, indikator kinerja beserta target tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang merupakan tugas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Demikian Penetapan Kinerja (Revisi) Tahun 2017 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang akan dilaksanakan dan dijadikan tolak ukur keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.